



## Kritik Plato terhadap Demokrasi: Telaah Filosofis dan Relevansi Kontekstual

Delavia Andrea Fererli<sup>\*1</sup> ID, Mutiullah<sup>2</sup> ID, Risky Aulya Ramadan<sup>3</sup> ID

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 55281, Indonesia

\*Corresponding Author: [delaviaandrea@gmail.com](mailto:delaviaandrea@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 17 June 2025

Revised 10 December 2025

Accepted 12 January 2026

Available online 30 January 2026

E-ISSN: 0216-9290

---

#### How to cite:

Fererli, D. A., Mutiullah. & Ramadan, R. A. (2026). Kritik Plato terhadap Demokrasi: Telaah Filosofis dan Relevansi Kontekstual. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 18 (1), 22-29.

---

### ABSTRACT

This article examines Plato's philosophical critique of democracy as set out in *The Republic*, with the aim of understanding its relevance in the context of modern democracy. Plato's critique is often perceived as an attack on the basic tenets of democracy, particularly regarding unbridled freedom, irrational leadership, and the potential degeneration of the system into tyranny. This article offers an examination of Plato's views on the five forms of government and the ideal structure of the state, namely leadership by philosophers who possess knowledge and wisdom. The approach used in this research is a qualitative literature review by analyzing the primary text of *The Republic* as well as secondary literature that discusses the dynamics of classical and contemporary democracy. The findings of this article show that Plato's concerns about populism, low political literacy, and the decadence of freedom remain relevant in reading today's democratic challenges. Despite its elitist nature, Plato's thought provides an alternative perspective that is critical of the weaknesses of democracy, and offers a concept of leadership based on reason and moral virtue. This article contributes to contemporary philosophical discussions by inviting readers to reflect on the foundations of democracy and the importance of strengthening moral and intellectual qualities in political leadership.

**Keyword:** Plato, Democracy, Populism, Philosopher Leadership, Political Critique

---

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kritik filosofis Plato terhadap demokrasi sebagaimana tertuang dalam karya *The Republic*, dengan tujuan memahami relevansi kritik tersebut dalam konteks demokrasi modern. Kritik Plato sering dianggap sebagai serangan terhadap prinsip dasar demokrasi, terutama terkait kebebasan yang tidak terkendali, kepemimpinan yang tidak rasional, dan potensi degenerasi sistem menjadi tirani. Artikel ini menawarkan telaah terhadap pandangan Plato mengenai lima bentuk pemerintahan serta struktur ideal negara, yaitu kepemimpinan oleh filsuf yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka kualitatif dengan menganalisis teks primer *The Republic* serta literatur sekunder yang membahas dinamika demokrasi klasik dan kontemporer. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Plato terhadap populisme, rendahnya literasi politik, dan dekadensi kebebasan tetap relevan dalam membaca tantangan demokrasi masa kini. Meskipun bersifat elitis, pemikiran Plato memberikan perspektif alternatif yang kritis terhadap kelemahan demokrasi, serta menawarkan konsep kepemimpinan berbasis akal dan kebajikan moral. Artikel ini berkontribusi pada diskusi filosofis kontemporer dengan mengajak pembaca untuk merefleksikan ulang fondasi demokrasi serta pentingnya memperkuat kualitas moral dan intelektual dalam kepemimpinan politik.

**Kata kunci:** Demokrasi, Kepemimpinan Filosofis, Kritik Politik, Plato, Populisme

---



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/politeia.v18i1.21331>

## 1. Pendahuluan

Saat ini, demokrasi sedang dipromosikan, disebarluaskan, dan dipraktikkan di seluruh dunia mulai dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika hingga negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Seiring dengan meluasnya penerapan demokrasi modern sebagai sistem pemerintahan negara, muncul pula klaim yang kuat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan ideal masa kini, karena dianggap mampu menyuarakan kebebasan secara luas dan masif.(Hashmi, 2018) Namun, dalam praktiknya, demokrasi tidak luput dari berbagai problematika seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh elitis (Miller, 2021), populisme (Hilmy, 2020), manipulasi opini publik(Salma Nabila Rianissa, 2024), dan krisis kepemimpinan. Fenomena ini memperlihatkan rapuhnya fondasi demokrasi kontemporer serta menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana demokrasi mampu menjaga stabilitas politik dan rasionalitas pemerintahan di tengah kompleksitas masyarakat modern, serta bagaimana ketahanan demokrasi dalam mempertahankan prinsipnya jika dikaitkan dengan kritik-kritik filosofis yang pernah diajukan sejak masa Yunani Kuno.

Plato, salah satu filsuf besar Yunani, lahir di kota Athena pada tahun 428 SM yaitu sebuah negara yang saat itu menganut sistem demokrasi langsung (*Direct Democracy*). (Atack, 2025) Meskipun berasal dari keluarga bangsawan (Aristokrat) yang ditarik dari garis keturunan ayahnya yang bernama Ariston yang merupakan keturunan raja Kodros, raja terakhir Athena sebelum sistem demokrasi berlaku di Athena. Plato tidak segan-segan memberikan padangan kritis terhadap aspek politik yang dinilainya tidak ideal. Sikap kritis dan berani bersuara ini tidak luput dari keterlibatannya dalam mengikuti diskusi-diskusi bersama Socrates. Tidak hanya itu saja, Plato juga memiliki pengalaman intelektual yaitu mempejari ilmu filsafat dari filsuf-filsuf terkemuka pada masa itu yaitu dari Kratylos hingga Socrates (Haq, 2020)

Kritik Plato terhadap bentuk pemerintahan demokrasi tidak semata-mata lahir dari penilaian filosofisnya, melainkan juga merupakan refleksi dari pengalaman langsung yang ia alami dalam kehidupan politik di Athena yang membuatnya tidak puas terhadap kondisi pemerintahan pada saat itu. Pengalaman yang berujung kepada ketidakpuasan ini dinilai Plato disebabkan oleh sistem demokrasi Athena yang tengah berada di ambang kehancuran, hal ini juga mengakibatkan guru sekaligus teman yang sangat ia kagumi dituduh melakukan kejahatan berat sehingga dijatuhi hukuman mati (Sifa et al., 2024)

Plato, melalui *The Republic*(Ferrari & Griffith, 2000), menjadi salah satu filsuf pertama yang secara sistematis mengkritik demokrasi. Bagi Plato, demokrasi lahir sebagai respons terhadap kemunduran sistem oligarki, ketika masyarakat mulai menyadari memburuknya kondisi negara. Meningkatnya angka kemiskinan, perebutan kekuasaan yang intens, hingga konflik berdarah menjadi indikasi krisis yang melanda. Plato menilai demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang tidak ideal, tetapi juga sebuah tahap kemunduran dari sistem politik yang rasional menuju kekacauan dan tirani (Andariati, 2020) Kritik tersebut berakar dari pandangan Plato bahwa pemerintahan yang adil harus dipimpin oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan kebaikan yakni seperti yang dimiliki oleh para filsuf.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran politik plato dan kritiknya terhadap demokrasi, baik dari perspektif filsafat politik klasik maupun dalam konteks demokrasi kontemporer.(Marshall & Bilsborough, 2010; Santas, 2007; Sharples, 1994). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif-normatif dan belum secara sistematis mengaitkan kritik plato dengan problem aktual demokrasi modern seperti populisme, krisis kepemimpinan, rendahnya literasi politik, dan dekadensi kebebasan. Berdasarkan celah tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kritik filosofis Plato dengan analisis problem demokrasi modern secara kontekstual, sehingga pemikiran klasik tidak hanya dipahami sebagai wacana historis, tetapi juga sebagai instrument kritis dalam membaca dan merespons tantangan demokrasi kontemporer.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah kritik Plato terhadap demokrasi hanya merupakan reaksi terhadap situasi politik di zamannya, ataukah ia mengandung muatan filosofis yang tetap relevan dalam membaca tantangan demokrasi modern? Adakah nilai-nilai atau kehati-hatian politik yang dapat diambil dari pandangan Plato untuk memperkuat demokrasi hari ini?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini adalah eksplorasi dan analisis pemikiran Plato mengenai demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam karya utamanya *The Republic* yaitu karya orisinal dari Plato sebagai sumber primer dalam penelitian ini, kemudian selain sumber primer tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang secara khusus membahas filsafat politik Plato, demokrasi klasik, serta relevansi pemikiran Plato dalam konteks demokrasi modern, antara lain karya Andariati (2020), Santas (2007), Arruzza (2017), Newberger (2024), dan sejumlah literatur kontemporer lainnya yang relevan. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama: *Pertama*, identifikasi

dan klasifikasi tema-tema utama kritik Plato terhadap demokrasi. *Kedua*, analisis konseptual terhadap struktur argument Plato yang menggunakan pendekata filsafat politik normatif. *Ketiga*, refleksi terhadap relevansi pemikiran Plato dalam konteks tantangan demokrasi kontemporer.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Biografi Plato

Plato (427 SM-347 SM) adalah seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani (Tang et al., 2021) Plato berasal dari keturunan bangsawan. Ia lahir di Athena. Ayahnya, Ariston, dikatakan sebagai salah satu keturunan Codro, raja legendaris terakhir Athena. Nama asli Plato adalah Aristocles, diambil dari nama kakaknya. Ibunya, Perictione, merupakan keturunan dari legislator terkenal, Solon. Perictione juga merupakan sepupu pertama Critias dan saudari Charmides, dua dari tiga puluh tiran Athena pada tahun 404 SM (Sfetcu, 2022).

Plato menerima pendidikan umum, menggambar, melukis, musik, dan puisi dari Kraityos, seorang murid Heraclitus yang pernah mengajarkan bahwa segala sesuatu berlalu seperti air. Ajaran ini tidak mampu mempengaruhi Plato yang terbiasa hidup dengan tradisi Aristocles dalam keluarganya. Plato sejak usia 20 tahun mengikuti pelajaran Socrates dan menjadi siswa yang setia. Socrates dimuliakan sampai akhir hayatnya. Dalam hampir semua karyanya yang selalu berbentuk dialog, Socrates diposisikan sebagai penyair pembimbing. Dengan cara ini, ajaran Plato keluar dari mulut Socrates. Plato menggambarkan Socrates sebagai penafsir hati orang-orang Athena yang ditindas oleh sukses kekuasaan. Sistem filsafat Plato, yang ditafsirkan oleh beberapa ahli sebagai penerus metode Socrates, juga disebut pelopor tradisi filsafat kritis (Falah & Musoffa, 2023).

Setelah Socrates meninggal pada tahun 399 SM, Plato pindah ke Megara dan menetap. Dari sana Plato mengarang dialog yang berkenaan dengan masalah hidup, yang ilmunya didapat dari Socrates. Tak lama setelah itu Plato juga berpindah ke Kyrena dengan tujuan memperdalam pengetahuan pada Theorodos mengenai Matematik. Setelah tak lama disana Plato pun berpindah ke Italia Selatan dan disana Plato berhasil menerapkan dan mempraktikkan ajaran filsafat dalam suatu pemerintahan, meskipun pada akhirnya Plato dituduh membahayakan kerajaan dan berakibat ditangkap dan dijual sebagai budal di pasas, akan tetapi ia ditebus lantaran terkenal sebagai murid Annikers. (El-Yunusi & Sholikhah, 2022). Setelah melalui perjalanan cukup Panjang dan singgah ke berbagai negara, Plato pada tahun 360 SM kembali ke Athena dan melanjutkan aktivitanya di akademi sampai dia meninggal pada tahun 348 SM.(Falah & Musoffa, 2023).

#### Kritik Plato terhadap Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis

Pemikiran Plato mengenai politik pada masanya dituangkannya dalam bukunya yang berjudul *The Republic*. Buku ini secara khusus berisi penjelasan mengenai negara-kota yang adil dan petingnya raja atau pemimpin yang merupakan filsuf agar keadilan dapat terwujud dalam suatu negara.(Roswantoro, 2015) Tidak hanya itu, Plato juga mengembangkan kritiknya terhadap demokrasi dalam karyanya tersebut, khususnya pada bagian yang menguraikan lima macam bentuk negara. Kelima bentuk pemerintahan ini ialah aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Menurut Plato, kelima negara tersebut akan muncul secara bertahap sebagai bentuk dari kemerosotan dari bentuk negara yang ideal. Baginya, tidak ada bentuk negara yang dapat hidup kekal, alasannya ialah setiap bentuk negara memiliki kelemahan internal dalam prinsip-prinsip dasarnya yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran.

##### a) Demokrasi sebagai Ketidakteraturan

Demokrasi, sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang disebut oleh Plato merupakan bentuk pemerintahan yang berada di tangan kalangan rakyat biasa dimana kebebasan adalah hal yang paling utama dalam bentuk pemerintahan ini. Menurut Paul W. Khan, demokrasi adalah pemerintahan yang berdaulat atas rakyat, bukan pemerintahan oleh mayoritas sementara. Oleh karena itu, kita harus memperluas pendekatan kita untuk memahami berbagai cara di mana demokrasi mewakili rakyat. Tiga sangat menonjol. Pertama, demokrasi berarti supremasi hukum. Kedua, demokrasi berarti rasa hormat dan martabat yang sama bagi setiap individu. Ketiga, demokrasi berarti pemilu sebagai metode pemilihan perwakilan publik. Kita tidak memiliki demokrasi jika salah satu dari elemen-elemen ini hilang.(Kahn, 2025)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebebasan ialah hal penting dalam prinsip demokrasi dan telah menjadi salah satu yang utama sejak demokrasi muncul pertama kali di zaman Yunani kuno hingga demokrasi modern saat ini, dalam pandangan Plato, hal ini bisa menjadi kelemahan bagi sistem ini sendiri. Menurut Plato, kebebasan yang tidak terkendali akan membuat orang bertindak sesuka hati tanpa memperhatikan disiplin dan ketaraturan. Dengan tidak adanya otoritas dan struktur yang jelas maka akan menyebabkan kekacauan sosial dan politik, lantaran setiap orang mengejar keinginannya sendiri tanpa memperhatikan kebaikan bersama.(Sharples, 1994)

Misalnya dalam pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat akan menimbulkan potensi ketidakteraturan dan keputusan yang salah dalam mengatur negara. Menurutnya, mengikuti opini publik seringkali tidak rasional dan mudah dipengaruhi oleh emosi, keinginan sesaat, atau informasi yang kebenarannya patut untuk dipertanyakan. Kebebasan dalam demokrasi memungkinkan setiap orang menyuarakan pendapatnya, namun apabila pendapat mayoritas itu tidak didasarkan pada penalaran yang rasional dan pemahaman yang benar, maka keputusan yang diambil bisa salah dan tidak baik bagi masyarakat secara keseluruhan.(Sharples, 1994)

Inti kekhawatiran Plato mengenai demokrasi yang berprinsip kebebasan ialah terletak pada kemungkinan akan munculnya ketidakteraturan dalam sistem pemerintah lantaran kurangnya penilaian rasional dan obyektif yang disebabkan oleh opini publik yang dangkal dalam penggunaan rasionalitas yang akan mencederai prinsip penting dalam suatu sistem pemerintah yaitu keadilan.

Hasil kajian terhadap *The Republic* menunjukkan bahwa Plato memandang kebebasan sebagai prinsip utama demokrasi, tetapi kebebasan yang tidak diarahkan oleh rasionalitas dan kebijakan justru melahirkan ketidakteraturan sosial dan politik. Temuan ini sejalan dengan Santas (Santas, 2007) yang menegaskan bahwa kritik Plato berakar pada struktur moral demokrasi yang membiarkan keinginan mayoritas menguasai akal budi. Arruzza (Arruzza, 2017) juga menunjukkan bahwa demokrasi dalam pandangan Plato cenderung kehilangan orientasi normatif ketika kebebasan dilepaskan dari tuntunan kebijakan.

Dalam konteks demokrasi modern, fenomena serupa terlihat melalui polarisasi ekstrem, disinformasi digital, dan keputusan publik yang kerap dipengaruhi emosi kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Plato tetap relevan. Dengan demikian, kritik Plato tidak dapat dipahami sekadar sebagai penolakan terhadap demokrasi, melainkan sebagai peringatan normatif bahwa demokrasi membutuhkan fondasi rasional dan etis agar kebebasan tidak berkembang menjadi sumber instabilitas politik.

### b) Ketiadaan Kepemimpinan yang Rasional

Menurut Plato untuk mewujudkan negara yang ideal, terdapat 3 struktur yang menjadi penopang negara. *Pertama*, golongan filsuf. Golongan ini akan menjadi yang diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah negara, hal ini disebabkan filsuf dipercaya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kapabilitas untuk menjadi seseorang yang mampu memerintah suatu negara, selain itu filsuf juga dipercaya memiliki sikap yang bijaksana dalam menjalankan tugas tersebut. *Kedua*, golongan militer. Golongan ini memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dan mengawasi negara agar terciptanya keamanan dan tunduk kepada pemimpin yaitu *Philosopher King*. *Ketiga*, golongan petani. Golongan ini memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai penopang kehidupan ekonomi rakyat.(Andariati, 2020)

Ketiga golongan tersebut dipandang Plato haruslah diisi dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sesuai dengan tugas masing-masing golongan agar tidak terjadi kekacauan dalam suatu negara. Seperti yang dituliskan oleh Plato dalam *The Republic*:

"Tetapi, ketika tukang sepatu atau orang yang memiliki bakat alami sebagai pedagang-dan memiliki kebanggaan atas kekayaan, kekuatan, jumlah pengikut, atau berbagai kelebihan lain sejenis berusaha menjadi prajurit, atau seorang prajurit melakukan pekerjaan yang tidak sesuai untuk dirinya dan ber-usaha menjadi pembuat undang-undang dan penjaga negara, di mana mereka saling bertukar peralatan kerja atau tugas; atau ketika satu orang yang sama melakukan semua pekerjaan itu, menjadi pedagang, pembuat undang-undang, dan prajurit sekaligus, maka aku pikir engkau akan setuju denganku jika aku mengatakan bahwa pertukaran dan percampuran seperti ini bisa mengakibatkan kehancuran negara."(Handayani, 2022)

Untuk dapat menentukan hal tersebut maka dibutuhkan pendidikan yang memadai untuk mengidentifikasi kemampuan atau bakat alami dari setiap orang tersebut. Dalam golongan pertama yaitu yang memiliki tugas kepemimpinan, bagi Plato untuk menjadi pemimpin maka dibutuhkan pengetahuan untuk memertahih kota dengan baik, dan kebijaksanaan tentang apa yang baik untuk kota secara keseluruhan dalam hubungan internal maupun eksternal. Hak semacam ini tidak dapat diberikan secara bebas kepada setiap orang karena hanya orang-orang yang memiliki kebijaksanaan tentang hal-hal penting negara yang pantas memerintah. Mereka yang memiliki kebijakan ini berhak memimpin, bukan karena mendapat persetujuan langsung dari rakyat, tapi karena memang lebih tau apa yang terbaik. Meskipun terdengar elitis, tetapi plato menilai bahwa dengan Pendidikan yang tepat, semua orang bisa menjadi bijaksana dan berhak memimpin (Santas, 2007).

Jika ditarik dalam demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting karena kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga keputusan terbesar dalam pemilihan pemimpin ialah terletak pada jumlah suara mayoritas.(Setiawan & Djafar, 2023) Sulit untuk memastikan bahwa cara tersebut dapat menjamin pemimpin yang dipilih memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan demikian

pemikiran Plato terhadap kota ideal tidak sepenuhnya demokratis, atau berpatokan kepada suara mayoritas, ia lebih menekankan kepada kapabilitas pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebebasan seperti inilah yang dikritik oleh Plato karena menurutnya dapat menimbulkan kepemimpinan yang tidak rasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Plato, kelemahan mendasar demokrasi terletak pada mekanisme pemilihan pemimpin yang tidak menjamin terpilihnya individu yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Kepemimpinan, bagi Plato, harus berlandaskan keutamaan moral dan kecakapan intelektual, bukan sekadar persetujuan mayoritas.(Santas, 2007) Pandangan ini relevan dengan kondisi demokrasi modern, di mana pemimpin populis kerap muncul melalui mobilisasi emosi massa tanpa fondasi kebijakan yang rasional. (Newberger, 2024) Oleh karena itu, kritik Plato menegaskan pentingnya menempatkan kompetensi, etika, dan kebijaksanaan sebagai standar utama kepemimpinan agar demokrasi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga kuat secara substantif.

### c) Demokrasi dan Kemunculan Tirani

Plato menempatkan demokrasi sebagai yang terburuk kedua dalam peringkat konstitusinya dalam buku *The Republic*. Ketika konstitusi yang lebih adil yaitu menurut Plato yaitu Aristokrasi mengalami penurunan secara kualitas, negara akhirnya meluncur ke dalam demokrasi, dan lebih jauh lagi ke dalam tirani. Dalam penggambaran Plato, kelemahan yang melekat pada demokrasi ialah merupakan fakta bahwa demokrasi akan mengarah pada tirani yang membuat ujungnya demokrasi tidak dinginkan dan tidak adil.(Newberger, 2024)

Menurut Plato, demokrasi secara alami melahirkan tirani karena dalam sistem demokrasi, semua keinginan dan opini dianggap setara tanpa hierarki moral, sehingga kebebasan berubah menjadi kebebasan tanpa batas yang mendorong masyarakat pada kehidupan hedonistic dan tidak terkendali. Dalam *The Republic*, Plato menggambarkan bahwa Ketika negara kehilangan kendali diri, mereka akan memilih pemimpin yang mencerminkan Hasrat mereka yaitu seorang tiran yang dipilih karena janji-janji populis, namun kemudian menggunakan kekuasaan untuk ememnuhi kepentingan pribadinya. Dengan demikian, tiran dinilai oleh Plato ialah sebagai ‘anak alami’ dari demokrasi yang telah mencapai titik ekstrem. Lebih lanjut Plato menilai tirani ialah akibat dari demokrasi yang terlalu demokratis, tanpa perlindungan terhadap pemimpin ekstremis tetapi populer dan tanpa penjagaan terhadap faksionalisme dan polarisasi serta demokrasi yang tidak liberal(Newberger, 2024)

Kritik Plato terhadap demokrasi menuai pro dan kontra dalam setiap lini zaman, dalam beberapa tahun terakhir sejumlah akademisi yang fokus dalam mempelajari karya-karya Plato berusaha untuk membela filsuf besar ini dari tuduhan pro-totitarianisme dengan berpendapat bahwa tujuan politik dalam *The Republic* bukanlah untuk menyerang demokrasi khususnya di Athena dan bahwa Plato hanyalah seorang kritikus yang baik hati terhadap lembaga-lembaga demokrasi dengan mencoba memperingatkan sesama warganya tentang bahaya kemerosotan demokrasi.(Arruzza, 2017) Seperti yang diutarakan oleh Galia Schapiro Newberger, ia berpendapat bahwa meskipun Plato anti-demokrasi dan tidak membayangkan konsep liberalism seperti sekarang, analisisnya tentang pembusukan demokrasi tetap relevan untuk memahami krisis demokrasi kontemporer. Ia melihat nilai dari pendekatan Plato justru karena perbedaan radikalnya, yang dapat membuka cara baru dalam membaca gejala kemunduran demokrasi.(Newberger, 2024)

Namun di satu sisi juga terdapat argumen yang bersifat kontra dari Cinzia Arruza, menurutnya pandangan Plato terhadap demokrasi ini bukanlah kritik reformis terhadap demokrasi, melainkan serangan langsung terhadap prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu keadautan rakyat. Ia menilai bahwa argument Plato bersifat anti demokratis baik dari segi isi maupun tujuannya, dan bertentangan dengan fakta sejarah,yaitu demokrasi Athena tidak runtuh karena tirani internal, melainkan akibat invasi asing.(Arruzza, 2017)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Plato memandang demokrasi memiliki kecenderungan internal menuju tirani, terutama ketika kebebasan berkembang tanpa kendali rasional dan moral. Kondisi ini sejalan dengan analisis Arruza yang menegaskan bahwa dalam *The Republic*, tirani bukanlah kecelakaan politik, melainkan konsekuensi logis dari demokrasi yang kehilangan orientasi etis.(Arruzza, 2017) Newberger juga menunjukkan bahwa gejala kemunduran demokrasi modern seperti meningkatnya ekstremisme, polarisasi, dan munculnya pemimpin otoriter mencerminkan kekhawatiran Plato tentang kerentanan demokrasi terhadap pembusukan internal.(Newberger, 2024) Dengan demikian, kritik Plato menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme pengendalian etis dan institusional agar tidak terjerumus ke dalam tirani yang lahir dari kebebasannya sendiri.

## Relevansi Kritik Plato terhadap Demokrasi Modern

### a) Populisme dan Kepemimpinan Demokrasi Modern

Seperi yang disinggung dalam latar belakang, salah satu masalah yang kerap muncul dalam sistem demokrasi modern adalah meningkatnya populisme. Kekhawatiran Plato mengenai naiknya pemimpin yang memanfaatkan emosi massa sangat relevan dalam konteks demokrasi modern yang kerap diwarnai oleh populisme. Pemimpin terpilih bukan karena rasionalitas dan visi kebijakan jangka Panjang, melainkan karena kemampuan mereka menyentuh sentimen publik.

Populisme dalam konteks pemikiran Plato sangat erat kaitannya dengan kritik demokrasi dan cara kekuasaan yang sering kali dimanfaatkan oleh para politikus untuk mendapatkan dukungan suara dari rakyat tanpa mengedepankan nalar dan kebijaksanaan. Menurut Plato, mayoritas terutama populisme bukanlah tolak ukur dari sebuah kebenaran, hal itu disebabkan karena ada kemungkinan politikus memenangkan suatu pemilihan dengan cara yang belum tentu atau bahkan tidak sesuai dengan nalar kebijaksanaan, mereka cenderung menghalalkan segala cara agar dapat mencapai jumlah suara yang diinginkan.(Tinambunan, 2023)

Bagi Plato, kebijaksanaan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam praktik politik justru sering kali terabaikan dalam sistem demokrasi yang idealnya menjunjung tinggi nilai tersebut. Sebagai seorang filsuf, ia berpandangan bahwa seorang pemimpin kota atau negara semestinya meraih kekuasaan melalui jalan kebijaksanaan. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit aktor politik yang memilih menggunakan pendekatan tirani atau otoriter dalam mencapai kepentingan politik.(Tinambunan, 2023)

Dengan demikian , relevansi kritik Plato terhadap demokrasi modern tampak jelas dalam fenomena populisme, ketika kepemimpinan politik lebih ditentukan oleh mobilisasi emosi massa daripada pertimbangan rasional. Dalam *The Republic*, Plato telah memperingatkan bahwa pemimpin dalam sistem demokrasi cenderung muncul bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena kemampuannya memanipulasi kehendak publik. Analisis ini sejalan dengan Tinambunan (2023) yang menunjukkan bahwa populisme modern sering mengorbankan rasionalitas kebijakan demi kepentingan elektoral. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanpa penguatan kebijaksanaan sebagai fondasi kepemimpinan, demokrasi berisiko kehilangan kualitas substantifnya.

### b) Krisis Representasi dan Rendahnya Literasi Politik

Plato menyampaikan kritik terhadap demokrasi karena sistem ini memberikan kewenangan pengambilan keputusan politik kepada masyarakat luas yang, menurutnya, belum memiliki pemahaman filosofis yang memadai. Dalam praktik demokrasi masa kini, persoalan serupa masih ditemukan, seperti rendahnya tingkat literasi politik di kalangan warga. Kondisi ini diperburuk oleh penyebaran disinformasi dan dominasi opini dangkal yang mengesampingkan proses diskusi rasional. Fenomena tersebut menguatkan pandangan Plato tentang pentingnya kehadiran pemimpin yang memiliki pendidikan moral dan intelektual. Dalam pandangan Nora Eka Putri, literasi politik merupakan kemampuan untuk memahami isu-isu politik, mengenali ideologi para calon pemimpin, serta menilai bagaimana preferensi politik mereka dapat memengaruhi individu dan masyarakat luas. Secara ringkas, literasi politik mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap dunia politik.(Putri, 2017)

Seperi yang dikatakan Wolff, "Membuat keputusan politik membutuhkan penilaian dan keterampilan. Itu harus, Plato mendesak, diserahkan kepada para ahli." Plato, melalui tokoh Socrates dalam *The Republic*, menggunakan sebuah analogi terkenal untuk mengkritik demokrasi, yaitu analogi tentang sebuah kapal. Dalam gambaran ini, negara diibaratkan seperti kapal besar yang harus diarahkan melintasi lautan luas. Agar kapal itu sampai tujuan dengan selamat, tentu dibutuhkan seorang kapten yang benar-benar memahami ilmu navigasi yang artinya tahu cara membaca bintang-bintang, memahami musim, mengenali arah angin, dan menguasai segala hal teknis yang berkaitan dengan pelayaran.(Handayani, 2022)

Namun, dalam sistem demokrasi yang dikritik Plato, kendali atas kapal justru diserahkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengerti soal pelayaran. Mereka tidak menghargai keahlian sang kapten sejati, bahkan menganggapnya sebagai pengamat bintang yang banyak bicara namun tidak berguna. Kapten sejati ini yang dalam pandangan Plato melambangkan seorang filsuf atau pemimpin ideal yang terdidik secara moral dan intelektual tidak dipercaya untuk memimpin, karena ia tidak mengikuti kehendak mayoritas penumpang yang tidak tahu arah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa betapa bahayanya jika kekuasaan politik berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Dalam demokrasi, orang yang fasih berbicara atau pandai mempengaruhi massa bisa lebih mudah terpilih, sementara orang yang benar-benar paham cara memimpin dianggap tidak relevan. Melalui analogi ini, Plato ingin menekankan bahwa negara membutuhkan pemimpin yang benar-benar tahu ke mana harus diarahkan, bukan sekadar yang pandai menyenangkan banyak orang. Maka, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa krisis representasi bukan sekadar kegagal

prosedural, melainkan kegagalan epistemik demokrasi yang mengabaikan fondasi pengetahuan sebagai syarat utama keberlanjutan sistem politik.

### c) Dekadensi Kebebasan

Kebebasan dalam demokrasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.(Beetham, 2004) Dalam demokrasi modern, kebebasan individu merupakan prinsip fundamental yang dijunjung tinggi. Namun, Plato menganggap bahwa kebebasan tanpa batas dalam demokrasi ini akan mengarah pada kekacauan tatanan masyarakat. Dalam demokrasi modern, hal ini muncul dalam bentuk polarisasi ekstrem, anarki informasi, dan hilangnya otoritas etika dalam ruang publik. Kebebasan yang tidak ditopang nilai bersama dapat menjadi destruktif, bukan konstruktif.

Lebih lanjut, kebebasan yang berlebihan dalam sistem demokrasi adalah kebebasan yang tidak dikendalikan oleh pengetahuan (episteme) dan akal budi yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran kebebasan itu sendiri dan transisi menuju tirani. Bagi Plato, kebebasan sejati bukanlah untuk melakukan apa pun yang diinginkan, melainkan kemampuan untuk hidup selaras dengan akal dan kebaikan sejati. Seperti yang tertulis dalam *The Republic*:

“...jika spirit kebebasan ini sedikit demi sedikit menemukan tempatnya dan tanpa disadari mulai

memengaruhi sikap dan kebiasaan kita. Dan kemudian, dengan kekuatan yang lebih besar mulai memengaruhi berbagai kesepakatan pribadi yang kita buat; hingga pada tahap berikutnya, dengan kekuatan yang lebih besar lagi, masuk dan memengaruhi berbagai produk hukum dan undang-undang yang kita buat; sampai pada akhirnya, wahai Socrates, menghan-curkan seluruh struktur kehidupan baik di sektor publik

maupun privat.”(Handayani, 2022)

Dialog tersebut menggambarkan bagaimana semangat kebebasan, jika tidak dikendalikan, dapat berkembang secara perlahan namun pasti menjadi kekuatan yang merusak tatanan kehidupan. Awalnya, kebebasan mempengaruhi sikap dan kebiasaan individu, lalu beralih ke dalam hubungan pribadi, hingga akhirnya mempengaruhi sistem hukum dan kebijakan publik. Pada puncaknya, semangat kebebasan yang mutlak ini tidak lagi membangun, melainkan justru menghancurkan struktur kehidupan sosial dan pribadi, karena menyingkirkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan keteraturan yang menjadi fondasi masyarakat.

Dengan demikian, maka Plato menawarkan konsep bahwa kebebasan harus diarahkan oleh pengetahuan dan keutamaan moral. Dalam demokrasi modern, hal ini mengimplikasikan pentingnya Pendidikan politik, etika publik, dan kesadaran warga sebagai penyeimbang terhadap kebebasan yang berpotensi destruktif.(Mohammad, 2016)

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kritik Plato terhadap demokrasi dalam *The Republic* berfokus pada tiga persoalan utama, yaitu kebebasan yang tidak terkendali, ketiadaan kepemimpinan yang berbasis kebijaksanaan, dan kecenderungan demokrasi untuk mengalami degenerasi menuju tirani. Plato memandang bahwa demokrasi yang tidak ditopang oleh rasionalitas dan kebijakan moral berpotensi melahirkan ketidakteraturan sosial, krisis kepemimpinan, serta pembusukan struktur politik dari dalam.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa kritik Plato memiliki relevansi yang kuat dalam membaca tantangan demokrasi modern. Fenomena populisme, rendahnya literasi politik, krisis representasi, disinformasi, dan dekadensi kebebasan yang terjadi dewasa ini mencerminkan kekhawatiran filosofis Plato tentang rapuhnya demokrasi ketika kebebasan dilepaskan dari tuntunan akal budi dan etika. Dengan demikian, pemikiran Plato tidak sekadar bersifat historis, melainkan menyediakan kerangka reflektif yang penting untuk memperkuat kualitas kepemimpinan, rasionalitas politik, dan kedewasaan warga dalam kehidupan demokrasi kontemporer.

## Daftar Pustaka

- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(1), 88–115.
- Arruzza, C. (2017). From Democracy to Tyranny: Plato, Trump, and the Misuses of a Philosophical Trope. *Bollettino Della Società Filosofica Italiana*, 69–81.
- Atack, C. (2025). Democracy Ancient and Modern? *Public Humanities*, 1, e15. <https://doi.org/10.1017/pub.2024.5>
- Beetham, D. (2004). The Quality of Democracy: Freedom as the Foundation. *Journal of Democracy*, 15(4), 61–75. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0057>
- El-Yunusi, M. Y. M., & Sholikhah, D. D. (2022). Konsep Pendidikan Menurut Plato Dan Ibnu Miskawaih. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(1), 62–75.

- Falah, M. Z. N., & Musoffa, A. (2023). Plato's Ethical Philosophy And Relevance To The Concept Of Birr Al-Wālidayn In The Qur'an. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 9(2). <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v9i2.278>
- Ferrari, G. R., & Griffith, T. (2000). *Plato: The Republic*. Cambridge University Press Cambridge.
- Handayani, D. S. (2022). *Republik*. Basabasi. <https://books.google.co.id/books?id=GfVXEAAAQBAJ>
- Haq, I. (2020). Teori Idea Plato. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(1), 68–82.
- Hashmi, R. S. (2018). Modern Democracy: Issues in Theory and Practice. *Journal Of Political Studies*, 25(1).
- Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 145–156. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080>
- Kahn, P. W. (2025). What Is Democracy? *Public Humanities*, 1, e16. <https://doi.org/10.1017/pub.2024.17>
- Marshall, M., & Bilsborough, S. A. (2010). The "Republic's Ambiguous Democracy. *History of Philosophy Quarterly*, 27(4), 301–316. JSTOR.
- Miller, M. K. (2021). A Republic, If You Can Keep It: Breakdown and Erosion in Modern Democracies. *The Journal of Politics*, 83(1), 198–213.
- Mohammad, M. (2016). Plato on freedom. *Review Journal Philosophy and Social Science*, 41(1).
- Newberger, G. S. (2024). *Protecting Democracy From Itself: Plato's Lessons for Modern Democracies*.
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Roswantoro, A. (2015). Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 15(2), 123–138. <https://doi.org/10.14421/ref.v15i2.1084>
- Salma Nabila Rianissa. (2024). Disinformasi di Era Post-Truth: Ancaman terhadap Demokrasi dan Mobilitas Global. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.659>
- Santas, G. (2007). Plato's Criticism of Democracy In The Republic. *Social Philosophy and Policy*, 24(2), 70–89. <https://doi.org/10.1017/S0265052507070173>
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201–213.
- Sfetcu, N. (2022). *Plato: Biography*.
- Sharples, R. W. (1994). Plato on Democracy and Expertise. *Greece and Rome*, 41(1), 49–56. <https://doi.org/10.1017/S0017383500023196>
- Sifa, E. Q., Asykiya, S., Juniza, V. R., & Pratam, M. A. (2024). Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Tang, M., Mansur, A., & Ismail, I. (2021). Landasan Filosofis Pendidikan: Telaah Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles. *Moderation/ Journal of Islamic Studies Review*, 1(1), 47–56.
- Tinambunan, E. R. (2023). *Analisis platonian atas fenomena regresi demokrasi di Indonesia*.